

Amat disayangkan, jika kemudian bencana ini ternyata tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Euforia pertarungan sengit Pemilihan Umum (Legislatif dan Eksekutif) tahun 2009, ditambah dengan situasi politik yang menghangat di negeri ini kala itu, disusul lagi dengan pemberitaan perihal bencana gempa bumi di Jawa Barat dan Sumatra Barat, akhirnya membuat peristiwa ini terkesan diabaikan. Padahal, peristiwa ini telah membawa dampak ekologis berupa pencemaran lingkungan dan ekosistem air laut di perairan Nusa Tenggara Timur yang notabene merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercatat Sebanyak 500 spesies pembentuk terumbu karang rusak dan 3.000 spesies ikan yang berada di kawasan *Coral Triangle* di Laut Timor terancam punah. Lebih lanjut, hasil uji laboratorium (*metode gravimetry*) afiliasi Departemen kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia pada bulan Desember menunjukkan bahwa sekitar 38,15 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor telah tercemar minyak mentah.⁴

Akibat peristiwa ini masyarakat di Pulau Rote, Ndao, Sabu, dan Timor akhirnya menjadi korban, tidak dapat mengonsumsi ikan apalagi menjual hasil lautnya ke pasaran. Bahkan, para petani rumput lautpun harus rela kehilangan omzet di pasaran karena harga jual rumput laut telah anjlok hingga empat kali lipat. Menurut data WALHI, kurang lebih 7.000 nelayan tradisional dapat kehilangan mata pencaharian dan petani Kabupaten Rote Ndao mengalami penurunan produksi dari 7.334 ton rumput laut kering per tahun menjadi 341,4 ton pada bulan Juni 2010. Situasi yang sangat menyedihkan, apalagi jika dihadapkan pada realita faktual bahwa sebagian besar masyarakat miskin di NTT hanya mampu menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan laut.

Pasca 60 hari terjadinya insiden tersebut Pemerintah Indonesia baru bereaksi. Pemerintah Indonesia Melalui kementerian Perhubungan, kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Luar Negeri coba melakukan pelbagai upaya untuk mengatasi hal ini. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Timor (Timnas PTMLT). Di bawah koordinasi Menteri Perhubungan RI, Freddy Numberi, yang bertugas untuk menjadi komunikator Pemerintah Indonesia dengan pihak PTTEP Australasia dan Pemerintah Australia, Timnas PTMLT membentuk lagi badan advokasi yang bertugas untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak PTTEP Australasia. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah kapan kompensasi atau dana ganti rugi yang diajukan akan direalisasikan pembayarannya. Tak terasa, telah dua tahun insiden meledaknya kilang minyak West Atlas Montara terjadi. Namun hingga sekarang masyarakat NTT, yang notabene menjadi korban dari peristiwa tersebut belum juga mendapatkan ganti rugi. Hal ini lantas menjadi indikasi yang menunjukkan bahwa kualitas dan kapabilitas diplomasi Pemerintah Indonesia tidak dapat diandalkan.

Perhitungan total kerugian yang cenderung fluktuatif yang dilakukan oleh Tim Advokasi kemudian menjadi salah satu alasan yang menyebabkan lambannya pencairan ganti rugi. Hitungan sementara tim advokasi, potensi kerugian total mencapai Rp247.004.104.423 dan kerugian langsung sebesar Rp42.167.198.497.⁵ Angka tersebut belum termasuk biaya operasional tim nasional dan biaya penanggulangan dampak lingkungan. Kalkulasi total kerugian yang diajukan oleh tim advokasi ini, jika dilihat lebih seksama masih jauh dari total ganti rugi yang diharapkan. Apalagi Perhitungan tim advokasi ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan perhitungan ganti rugi yang dilakukan oleh Pemda NTT dan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB). Berdasarkan perhitungan Pemda Provinsi NTT, kerugian total ditaksir mencapai Rp806.168.200.000.⁶ Sedangkan, menurut perhitungan YPTB kerugian total yang dialami sebesar 140.000.000.000.⁷ rancunya kalkulasi biaya ganti rugi yang diajukan kemudian membuat PTTEP Australasia menolak untuk membayar ganti rugi yang ada.

Bahkan PTEEP Australasia hanya menawarkan ganti rugi dalam bentuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dana pertanggungjawaban sosial perusahaan, senilai USD 3-5 juta⁸ atau setara Rp 25,5 miliar (kurs Rp 8.500/USD 1), jika kemudian tawaran ini diterima maka paling tidak masing-masing penduduk yang terkena dampak langsung pencemaran Laut Timor hanya mendapatkan kompensasi dana sebesar Rp 500.000. Dana sebesar itu tentu tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami selama dua tahun belakangan ini. Paling-paling dana tersebut cukup untuk membeli beras sebanyak 100 kg. Itupun dengan asumsi bahwa beras yang dibeli harganya tidak lebih dari Rp.5000/kg. Menyedihkan memang.